



BAA

"PERSPEKTIF HUKUM BISNIS PADA ERA TEKNOLOGI" / 7

Pidato Pengukuhan

Diucapkan Pada Peresmian Jabatan Guru Besar
di dalam Hukum Dagang pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Oleh :

Sri Redjeki Hartono

Semarang, Senin, 18 Desember 1995

Yang terhormat

Saudara Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro

Saudara-saudara Anggota Senat/Dewan Guru Besar Universitas Diponegoro

Para Pejabat Sipil dan ABRI

Para Anggota Dewan Penyantun

Para Rektor, Pembantu Rektor, Dekan dan Pimpinan Universitas dan Fakultas di lingkungan Universitas Diponegoro.

Para Rektor, Pembantu Rektor, para Dekan dan Pimpinan di luar Universitas Diponegoro.

Rekan-rekan Dosen dari Universitas Negeri maupun Swasta.

Seluruh hadirin tamu Undangan Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro yang saya muliakan.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Maha Besar Allah yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat, tanpa kurang suatu apapun. Puji syukur kepada Allah yang Maha Pemberi, yang karena Karunia-Nya, saya dapat berdiri di hadapan para hadirin yang saya muliakan pada sidang yang terhormat pada hari ini.

Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro, yang telah menyelenggarakan Rapat Senat Terbuka ini dengan mengundang berbagai pihak untuk memberi kesempatan kepada saya membacakan pidato pengukuhan ini.

Hadirin yang saya muliakan,

Di dalam antusiasisme menyongsong abad ke XXI mendatang, di dalam masyarakat tampak adanya kecenderungan perubahan dan pergeseran nilai-nilai yang relatif cukup mendasar.

Pola kehidupan dan perilaku masyarakat pada dua dekade yang terakhir ini menunjukkan adanya pergeseran dan perubahan dari pola lama menuju pola baru, yang disebabkan oleh berbagai faktor dan karena berbagai kebutuhan, antara lain globalisasi ekonomi, komunikasi dan informasi serta kebutuhan pasar.

Pergeseran dan perubahan itu sendiri pada dasarnya bersifat simultan yang hampir meliputi semua aspek kehidupan termasuk kehidupan perekonomian dalam pengertian luas. Oleh karena itu, perkenankan saya dengan kerendahan hati berdiri di hadapan para hadirin pada sidang yang terhormat ini menyampaikan pidato pengukuhan dengan inti permasalahan :

"Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi"

Hadirin yang saya muliakan,

Pendahuluan

Sudah pada saatnya para ahli hukum baik yang berkarya dan bertugas di bidang pendidikan di Perguruan Tinggi, maupun yang bertugas di bidang penerapan hukum di dalam masyarakat untuk menahan diri sejenak guna mengadakan observasi dan inventarisasi terhadap hasil-hasil perkembangan dan kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi sejak lima dekade yang terakhir ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap hukum dan ilmu hukum pada umumnya. Observasi dan inventarisasi diri adalah satu langkah untuk mengadakan instropeksi

yang merupakan satu tindakan yang arief. Ilmu, pengetahuan dan teknologi secara pasti selalu maju dengan memberikan berbagai pembaharuan dan perubahan kepada manusia dan masyarakat. Pembaharuan yang diberikan oleh Iptek sangat mempengaruhi pola tata kehidupan di dalam masyarakat, termasuk pola kehidupan pada masyarakat bisnis.

Perubahan-perubahan pola kehidupan di dalam masyarakat baik langsung atau tidak juga akan mempengaruhi nilai-nilai yang dianggap benar dan tidak benar, adil dan tidak adil, patut dan tidak patut.

Pertanyaan mendasar yang akhirnya perlu memperoleh kajian lebih lanjut adalah : sudahkah perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu hukum, baik pada pelaksanaan proses belajar mengajar di perguruan tinggi maupun penerapannya di dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang selalu berkembang dan berubah?

Dua puluh tahun mendatang di beberapa kawasan dunia, pola kerjasama yang disepakati sejak saat ini mulai dilaksanakan secara efektif antara lain di kawasan Asia Pasific, Asia Tenggara dan beberapa belahan dunia lain. Pola kerjasama yang disepakati tersebut pada dasarnya mengacu pada satu hal yaitu diciptakannya "pasar bebas" / liberalisasi pasar.

Dengan demikian proyeksi untuk dua sampai tiga dekade yang akan datang sangat perlu dilakukan, yaitu dalam rangka mengadakanantisipasi yang cermat. Antisipasi yang cermat adalah penting karena situasi masa depan akan menimbulkan berbagai perubahan terhadap semua aspek kehidupan, tidak semata-mata pada aspek kegiatan ekonomi saja, tetapi meliputi pula berbagai aspek hukum.

Perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi telah menjadikan dunia ini semakin dekat. Pengaruh globalisasi, transformasi dan komunikasi, telah memberikan warna yang berbeda dengan keadaan masa lalu. Tatapan masa depan, langkah ke masa abad XXI walaupun masih sulit diproyeksikan secara detail, akan tetapi sudah dapat digambarkan keadaannya, untuk masa dua puluh tahun pertama. Tidaklah sulit menebak apa yang akan terjadi pada masa itu. Terutama sekali tatanan masyarakat dunia akan banyak berubah, terutama sekali jika diikuti perkembangan pada dunia ekonomi. Dunia terpolarisasi menjadi beberapa kelompok ekonomi besar, seperti negara-negara Amerika Utara, Masyarakat Ekonomi Eropa, Asia Pasific dan sebagainya. Proyeksi ini bukanlah ramalan tanpa dasar, melainkan suatu proyeksi antisipatif.

Hadirin yang saya muliakan,

Empat puluh tahun setelah Perang Dunia Kedua, tampak adanya perkembangan baru yaitu adanya ekspansi produksi dan produktifitas yang melanda dunia perdagangan dan investasi. Di samping itu terjadi pula perkembangan dan loncatan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menghasilkan berbagai pembaharuan di semua bidang. Kenyataan menunjukkan bahwa, setiap pembaharuan yang terjadi, dengan cepat diambil dan dimanfaatkan oleh bidang ekonomi. Dengan demikian pada sisi yang lain dapat dikatakan teknologi baru merupakan juga suatu komoditi baru.

Komoditi baru, adalah suatu obyek baru yang dapat ditransaksikan. Dengan demikian setiap temuan baru, setiap metode baru dan setiap pendayagunaan baru dengan cepat akan dimanfaatkan oleh dunia bisnis sebagai komoditi secara

maksimal. *Dunia bisnis* adalah dunia yang penuh dengan kreatifitas dan inovasi yang sangat efektif karena tujuannya yang mapan dan jelas yaitu keuntungan ekonomi. Hal ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan kreatifitas di bidang-bidang lain di mana faktor idealisme dan kepuasan batin yang lebih dominan sehingga nilai ekonomi dapat dikesampingkan.

Bertolak dari pemikiran di atas, para teoritis hukum selalu didera oleh berbagai pertanyaan mendasar yang pada akhirnya selalu bermuara pada satu titik yaitu pada harkat dan martabat kehidupan manusia dan kemanusiaan. Demikian pula saya pribadi selalu dikungkung pada pola-pola persoalan dan pertanyaan mendasar antara lain :

Seberapa jauh hukum mampu memberikan solusi atas setiap kemajuan dan perkembangan lptek dalam rangka melindungi kehidupan kemanusiaan?

Seberapa jauh hukum mampu mengatur dan memberikan pengamanan dan rambu-rambu bagi kegiatan ekonomi yang dapat memberikan dan menjamin keseimbangan kepentingan di dalam tata kehidupan ini?

Aspek hukum apa sajakah yang perlu disiapkan untuk mengantisipasi perkembangan lptek dalam rangka kehidupan kebangsaan dan perekonomian nasional?

Hadirin yang saya muliakan.

Hukum sebagai nilai-nilai yang menggambarkan abstraksi dari nurani manusia dan kemanusiaan mengenai adil dan tidak adil, benar dan tidak benar, sah dan tidak sah, patut dan tidak patut, pada hakikatnya mampu menjawab atas semua persoalan di atas.

Secara rinci, hukum akan menampakkan diri sebagai

seperangkat peraturan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai mengenai antara lain :

- pemanfaatan lptek secara maksimal yang tidak membahayakan manusia dan kehidupan;
- tidak melanggar kepentingan dan hak-hak pribadi maupun hak-hak publik/masyarakat;
- pengakuan dan prosedur pengakuan hak oleh negara di bidang hak milik intelektual;
- pengaturan tentang/mengenai keseimbangan kepentingan publik terhadap kepentingan individu kelompok publik dan sebagainya, sebagai keseimbangan kepentingan para pihak.

Mengingat luasnya dan sekaligus tipisnya batas antara nilai kemanfaatan dengan dampak yang timbul dari teknologi, maka sangat dibutuhkan berbagai aspek hukum sekaligus untuk mengatur penggunaan teknologi pada umumnya. Berbagai aspek hukum yang dimaksud, meliputi baik aspek hukum publik (aspek pidana dan administrasi) maupun aspek hukum perdata/privat.

Dengan demikian hukum juga mampu memberikan solusi atas kemungkinan penggunaan dan pemanfaatan lptek untuk sebesar-besarnya kemanfaatan dan kelangsungan kehidupan kemanusiaan. Untuk itu perlu diciptakan dari berbagai aspek hukum, baik yang bersifat publik maupun yang bersifat perdata.

Hadirin yang saya muliakan.

Perkembangan, pembaharuan dan pengembangan teknologi pada umumnya adalah karya masyarakat, karena kerajinan, ketekunan, kemampuan berpikir dan berkarya anggotanya. Kegiatan di kalangan peneliti, ilmuan dan orang-orang

dengan kualifikasi tertentu dengan kreatifitas yang tinggi juga merupakan karya kemanusiaan/karya masyarakat. Hasil ketekunan, kreatifitas dan kemampuan yang dihasilkan tersebut yang pada dasarnya mampu mengubah, memperbaiki dan mengakomodasikan berbagai kebutuhan/kepentingan umat manusia, untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, merupakan komoditi yang tinggi nilai ekonominya. Sesuatu yang nilai kemanfaatannya cukup tinggi, maka secara otomatis menyebabkan nilai ekonominya juga menjadi lebih tinggi pula. Suatu benda atau kebendaan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, mengandung dan mengundang potensi pertikaian yang tinggi pula. Oleh karena itu hukum perlu dan harus mengatur semua kemungkinan yang dapat terjadi. Dengan adanya kemungkinan tersebut di atas, maka hukum muncul sebagai kekuatan yang memberikan solusi. Solusi yang diberikan oleh hukum dalam hal ini adalah :

memberikan rambu-rambu dengan mengatur keseimbangan kepentingan berbagai pihak terhadap pemanfaatan komoditi baru, antara lain di dalam peraturan tentang hak milik intelektual.

memberikan pengakuan terhadap penemu, pencipta sebagai pemilik yang berhak antara lain dalam undang-undang tentang hak paten dan undang-undang tentang hak cipta.

memberikan perlindungan terhadap kemungkinan pelanggaran hak dan sebagainya terhadap semua pihak yang beritikad buruk, antara lain dapat diakomodir oleh undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang persaingan sehat dan undang-undang usaha kecil.

Realisasi partisipasi hukum terhadap kemajuan dan perkembangan teknologi antara lain dengan mengatur tentang :

pengakuan dan pemberian hak terhadap penemuan, pemakaian, peredaran teknologi baru;

melindungi terhadap yang berhak menggandakan dan mengedarkan dan pemakai yang sah;

mengatur tentang transaksi teknologi baru yang bersangkutan dengan tujuan menjaga keseimbangan kepentingan yang mungkin berbenturan dan pertentangan yang mungkin timbul.

Jadi pada dasarnya hukum yang merupakan satu kesatuan nilai yang abstrak mencoba melindungi semua pihak di dalam masyarakat termasuk karya masyarakat itu sendiri dan semua kepentingan di dalam masyarakat untuk sebesar-besarnya kepentingan kemanusiaan. Hukum harus mampu memberikan nuansa aman di dalam tata pergaulan kehidupan di dalam masyarakat, mengingat bahwa teknologi tidak saja membawa manfaat pada kehidupan manusia, tetapi dapat pula memberi/menciptakan malapetaka yang fatal sifatnya. Perlindungan tersebut antara lain diberikan oleh undang-undang di bidang hak milik intelektual, undang-undang di bidang lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Hadirin yang saya muliakan.

Bertolak dari pemikiran di atas, akhirnya kita sampai pada berbagai pertanyaan yang sifatnya mendasar yang pada hakikatnya membutuhkan jawaban yang mendasar pula :

seberapa jauh hukum mampu mengatur dan menjaga kemajuan teknologi sebesar-besarnya untuk kehidupan manusia?

seberapa jauh ilmu hukum mampu melakukan antisipasi terhadap penyimpangan pemanfaatan teknologi?

seberapa jauh pendidikan hukum mampu menyiapkan tenaga yang mampu mengatur keseimbangan kepentingan terhadap pemakai teknologi, khususnya di bidang dunia bisnis?

Hadirin yang saya muliakan

Pada dasarnya setiap penemuan dan teknologi baru, cara/metoda memproduksi baru serta daya pemanfaatan teknologi baru akan segera menjadi komoditi baru yang dapat segera ditransaksikan di dalam kegiatan bisnis pada umumnya. Dunia bisnis adalah dunia yang penuh dengan kreatifitas dan inovasi yang sangat efektif dan bergerak dengan sangat cepat. Keadaan ini adalah sejalan dengan sasaran yang selalu ingin dicapai oleh dunia bisnis pada umumnya ialah pembaharuan. Pembaharuan itu sendiri merupakan hasil kreatifitas dan inovasi yang terus menerus dilakukan, dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar.

Kreatifitas dan inovasi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi merupakan komoditi yang dicari yang dapat menimbulkan ketidak seimbangan di dalam berbagai hal, untuk itu sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mampu mengatur dan menjaga keseimbangan yang seharusnya ada.

Hadirin yang saya muliakan

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut di atas, maka kita juga perlu kembali pada pertanyaan mendasar mengenai hukum itu sendiri. Apakah hukum? Terlalu banyak batasan mengenai hukum, sangat bergantung dengan sisi pendekatan, isi yang memberi batasan sesuai dengan tujuan dan kepentingannya. Oleh karena itu, apapun batasan dan pendekatan yang dipakai mengenai pemahaman hukum,

saya berpendapat bahwa hukum harus mampu menjaga dan mengatur harkat dan martabat manusia dan kehidupan kemanusiaan dengan mengatur keseimbangan kepentingan semua pihak demi kesejahteraan nilai-nilai kemanusiaan.

Telah menjadi kenyataan di depan mata kita, bahwa dunia bisnis merupakan bidang yang paling mapan dalam memanfaatkan teknologi. Kemapanan ini disebabkan adanya kemampuan dari dunia bisnis untuk menciptakan kembali kebutuhan yang selalu dapat dimanfaatkan setiap hasil iptek menjadi barang/benda untuk masa sekarang, maupun masa mendatang.

Pemanfaatan kreatifitas masyarakat oleh dunia bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pada era teknologi ini juga merupakan suatu penyesuaian strategis pemanfaatan sumber daya yang lain. Di dalam masyarakat pasca industri dunia bisnis mengalami perubahan yang agak mendasar yaitu pada tujuan dan asumsi-asumsinya mengenai strategi sumber daya yaitu **dari hasil financial capital menjadi human capital**, dari sasaran memperoleh keuntungan secara maksimal berubah bahwa manusia adalah sasaran utama dan sasaran akhir. Keuntungan apapun tidak akan ada manfaatnya apabila tidak berdayaguna secara maksimal untuk manusia. Akhir dari padanya akan bermula pada pendidikan, karena pendidikanlah yang mampu menaikkan dayaguna manusia.

Masyarakat bisnis meyakini bahwa telah terjadi pandangan konsep baru terhadap filosofi bisnis. Yakni pandangan ke depan adalah suatu upaya untuk meraih keberhasilan yang diinginkan dengan mudah. Vision (visi) merupakan matarantai antara impian dan kenyataan/kegiatan. Dan akhirnya kita sampai pada suatu pemahaman bahwa sumberdaya manusia

adalah merupakan sasaran penting dalam pembangunan masyarakat bisnis dan masyarakat keilmuan yang lain. Sumberdaya manusia bermutu, tidak saja mampu mengembangkan sistem untuk mencapai tujuan dengan efektif, akan tetapi meningkatkan juga kemampuan untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing bidang serta keseimbangan kepentingan pada banyak pihak. Dengan pemahaman baru terhadap arus informasi (dalam artian yang sangat luas), maka akan terjadi suatu kilas balik yang mempertanyakan sudahkah dunia pendidikan hukum memperhatikannya? Bagaimana kita belajar mencapainya? Apakah informasi baru diperlukan juga sebagai salah satu kemampuan yang harus dikuasai oleh bidang pendidikan hukum? Dan lebih luas lagi oleh para ahli hukum.

Mulai tahun delapan puluhan, oleh para ahli telah disadari bahwa kita harus berbuat sesuatu terhadap dunia pendidikan. Telah disadari pula, bahwa terhadap kekeliruan di dalam penerapan sumber-sumber informasi pengetahuan kepada para mahasiswa; terutama pandangan filosofisnya, serta metodologinya. Kekurangan dalam dua wawasan ini; menjadikan para mahasiswa sering melakukan kekeliruan dalam mengembangkan konsep-konsep pengetahuan pada umumnya dan konsep filosofi hukum pada khususnya, serta bagaimana menciptakan sumberdaya manusia yang bermutu.

Di negara-negara maju, telah terjadi pula pergeseran terhadap kelas manajemen menengah. Arah perkembangannya tertuju pada bentuk jaringan kerja manajemen mandiri yang terdiri dari kelompok multi disiplin, dan dalam kelompok kerja yang lebih ramping. Dunia bisnis mulai menyusun struktur baru di mana self-management menggantikan staf managernya

yang mengatur manusia, dan komputer menggantikan tangan-tangan para manager yang mengatur sistem. Dengan demikian teknologi baru dapat dengan cepat menyajikan informasi kepada masyarakat, yang oleh kalangan manager menengah tidak mampu dilakukan. Inovasi teknologi telah menumbuhkan kemampuan sistem self-management. Apakah yang menjadi masyarakat bisnis menjadi sangat memperhatikan teknologi guna memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat? Salah satu yang penting adalah pengamatan (vision), yakni seluruh pandangan baru kemana harus dituju dan bagaimana mencapainya. Pandangan tersebut sampai pada kesimpulan bahwa organisasi masyarakat bisnis yang paling utama adalah manusianya yang akan menggantikan seluruh sistem dengan bantuan peralatan teknologi yang selalu berkembang dan maju. Sumber vision adalah pimpinan, yakni seseorang yang memiliki kombinasi ketrampilan yang unik, antara kekuatan mental untuk kreatif dan kemampuan praktis untuk melaksanakan dalam mencapai tujuannya.

Satu hal yang patut diakui dan disadari ialah bahwa tugas kita di bidang pendidikan dan pendidikan hukum pada khususnya menunjukkan hasil yang mempunyai kecenderungan bahwa mahasiswa menjadi kurang kreatif dan kurang mampu berpikir kreatif. Guna mengurangi kekurangan tersebut adalah sudah waktunya apabila diadakan pembaharuan pada pendidikan tinggi hukum, yaitu dengan selalu memanfaatkan setiap informasi baru, kebutuhan baru masyarakat, termasuk masyarakat bisnis sejalan dengan perkembangan iptek pada umumnya.

Hadirin /ang saya muliakan.

**Pembaharuan
Pendidikan
Hukum**

Pembaharuan dunia pendidikan, khususnya bidang hukum adalah meletakkan kualitas sumberdaya manusia, sebagai segala-galanya. Kualitas harus merupakan **"the bottom up"** dari pendidikan dan proses pembelajaran. Dengan demikian akuntabilitas pendidikan yang baru tidak hanya ditentukan oleh berapa jumlah yang diluluskan, sebagai ukuran efektifitas pengajaran, akan tetapi unsur kemampuan berpikir, belajar dan kreatifitas sangat diperlukan dalam masyarakat teknologi baru. Pandangan baru dunia pendidikan harus berani bergeser, tidak saja memperhatikan seberapa banyak lulusan yang dihasilkan, akan tetapi pada kemantapan seberapa tingkat mutu yang perlu dicapai.

Satu pendidikan menjadi sangat tidak bermanfaat, apabila tidak mampu mengajarkan bagaimana berpikir. Hal ini perlu dikemukakan mengingat dewasa ini terdapat kecenderungan bahwa sebagian besar mahasiswa sangat lemah dalam kemampuan berpikir. Padahal berpikir kreatif sangat dipentingkan pada masa sekarang ini. Berpikir dengan penuh atas nilai dan norma sangat diutamakan di dalam hukum dan berpikir kreatif yang konsisten sangat dipentingkan dan dibutuhkan serta diutamakan di dalam dunia bisnis. Karena kreatifitas akan menentukan seberapa jauh kadar kemampuan seseorang untuk berkompetisi.

Mengingat bahwa semua hal yang berkaitan dengan hukum, adalah yang erat kaitannya dengan nilai-nilai yang langsung menyangkut manusia dengan harkat dan martabatnya, maka dengan demikian hukum sebenarnya sangat mengandung nilai-nilai filosofis yang menyangkut harga diri manusia termasuk masa depannya.

Satu pemikiran/ide yang pernah dikemukakan bahwa pendidikan hukum pada Strata Satu **hanya sekedar menciptakan tukang** semata-mata merupakan satu pemikiran yang kurang bijak. Saya sangat berkeberatan dari pernyataan tersebut yang terasa sangat sederhana bahwa sarjana hukum sebagai sekedar tukang membuat surat:

gugatan

dakwaan

pembelaan

permohonan

dan seterusnya dan seterusnya.

Masalahnya adalah bahwa seharusnya mahasiswa tidak dilatih untuk sekedar **membuat** surat/dokumen saja, tetapi seharusnya mahasiswa dilatih untuk beradu argumentasi yang benar dan sah, adil dan tidak adil, patut dan tidak patut mengenai isi surat-surat tersebut. Surat-surat dokumen tersebut pada dasarnya mengandung banyak hal yang menyangkut harkat, martabat, status, tetapi juga hak dan kewajiban dari semua kepentingan manusia pada satu konteks tertentu .

Semua dokumen yang menyangkut manusia, pada hakekatnya tidak sekedar memuat informasi tentang keadaan manusia yang bersangkutan, tetapi pencerminan harkat dan martabat manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Dokumen-dokumen, surat-surat yang dimaksud adalah penuh dan sarat dengan hak dan kepentingan dan kewajiban seseorang yang mungkin :

untuk dipertahankan dari pihak lain

- untuk dituntut dari pihak lain;
- untuk diperjuangkan dari pihak lain;
- untuk memberi sanggahan terhadap orang lain;
- untuk memberi pernyataan terhadap pihak lain;

Hak dan kepentingan yang dipertahankan, dituntut dan dinyatakan tersebut tidak semata-mata hanya sekedar dinyatakan tetapi harus mengandung : Kebenaran materiil dan formil. Hal inilah yang harus dan mampu diformulasikan dan dikonstruksikan dalam suatu "surat-surat" dengan argumentasi yang benar (baik materiil maupun formil). Dengan demikian, sebenarnya pendidikan hukum tidak sekedar untuk menciptakan seorang Sarjana Hukum, tetapi sarjana hukum yang tanggap atas nilai-nilai luhur. Kemanusiaan, serta kreatif memenuhi kebutuhan masyarakat atas setiap nilai yang selalu berubah.

Sistem pendidikan, khususnya pendidikan hukum, yang terlalu sentralisasi, akan sulit menumbuhkan jiwa kompetitif dan sikap kreatif. Bagaimana peranan pendidikan hukum, dalam menumbuhkan kreatifitas, terutama sekali dalam membantu masyarakat bisnis untuk mencapai sasaran usahanya?

Salah satu jawaban yang penting adalah melatih kemampuan berpikir, untuk masa depan. Karena perkembangan masyarakat bisnis adalah untuk kehidupan masa depan yang lebih baik dan maju. Kehendak ini, dapat dijabarkan dalam simbiose mutualis antara pendidikan hukum dan dunia bisnis dalam berbagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

Hadirin yang saya muliakan.

Tugas utama pendidikan adalah menyiapkan mahasiswa untuk kehidupan di masa depan, sebagian besar untuk

meraih sesuatu lapangan kerja yang sangat luas ditawarkan oleh masyarakat. Dewasa ini terjadi kecenderungan "mismatch" antara pendidikan dan kebutuhan dunia bisnis dan dunia kerja di masyarakat. Kerjasama yang saling menguntungkan dan saling memanfaatkan dapat terjadi antara masyarakat bisnis dan pendidikan hukum. Pendidikan hukum dapat merupakan laboratorium pengkajian semua aturan main dalam masyarakat ekonomi, khusus bisnis dan masyarakat bisnis akan bertindak juga sebagai laboratorium mahasiswa dalam memperdalam pemahamannya tentang semua tatanan masyarakat bisnis. Pandangan bahwa perguruan tinggi harus mampu menghasilkan sarjana siap pakai, salah satu upayanya adalah pengembang-tumbuhkan keterlibatan masyarakat dalam dunia pendidikan secara nyata dan operasional.

Hadirin yang saya muliakan.

***Perspektif
Hukum Bisnis
Pada Era
Teknologi***

Masyarakat, kegiatan ekonomi masyarakat, pelaku ekonomi dan perusahaan merupakan istilah-istilah yang masing-masing mempunyai arti dan pengertian yang berbeda dan mengandung makna yang khusus, tetapi istilah satu dengan istilah yang lain menjadi saling membutuhkan dan saling melengkapi, karena saling bertautan dalam satu sistem kerja yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan ekonomi masyarakat dalam pengertian yang luas, saat ini menjadi kajian hukum ekonomi. Bidang kajian hukum ekonomi adalah sangat luas, karena meliputi dua ruang lingkup sekaligus, yaitu :

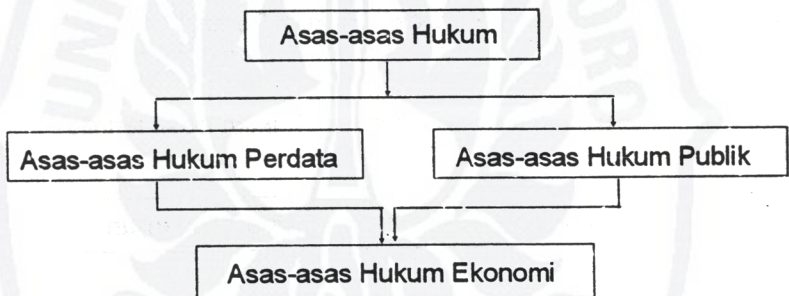
Pertama, pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam pengertian peningkatan kehidupan ekonomi nasional secara makro;

- Kedua, pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata.

Mengingat luasnya bidang kajian hukum ekonomi pada umumnya, maka hukum ekonomi dapat dikatakan mampu mengakomodasikan dua aspek hukum sekaligus sebagai suatu kajian yang komperhensif.

Adapun aspek hukum yang dirnaksud meliputi baik aspek hukum publik maupun aspek hukum perdata, sehingga dari kedua aspek hukum tersebut mengandung berbagai asas hukum yang bersumber dari kedua aspek hukum dimaksud yang dapat digambarkan sebagai berikut :

**Proyeksi Asas-asas Hukum Ditinjau dari
Kajian Hukum Ekonomi**



Dari keluasan asas-asas hukum yang dapat diakomodir hukum ekonomi baik yang bersumber dari asas-asas Hukum Perdata/Hukum Dagang maupun asas-asas Hukum Publik, pada dasarnya dapat ditarik menjadi asas-asas hukum dari bagian-bagian hukum tertentu yang mengandung nilai-nilai untuk melindungi berbagai aspek kehidupan kemanusiaan di dalam kegiatan ekonomi dalam pengertian yang luas.

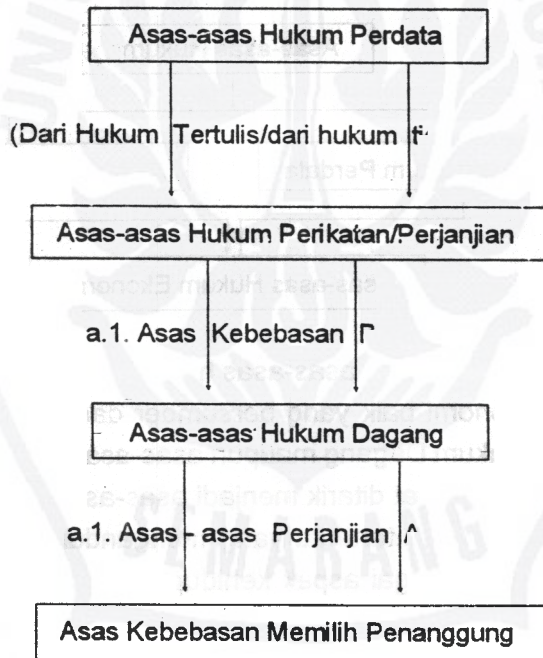
Asas-asas utama dari hukum ekonomi yang sangat patut mendapat perhatian antara lain adalah :

- asas keseimbangan kepentingan;
- asas pengawasan publik;

asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi.

Sedangkan asas-asas hukum yang bersumber dari Hukum Perdata dan atau Hukum Dagang pada dasarnya hanya mengandung satu segi saja, yaitu khusus mengenai hubungan hukum para pihak di dalam suatu kegiatan tertentu yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Proyeksi Asas Hukum Ditinjau dari Aspek Hukum Dagang



Hadirin yang saya muliakan.

Hukum bisnis pada dasarnya dapat diartikan sebagai perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan bisnis, yaitu suatu kegiatan yang mengefektifkan waktu dan modal dalam rangka memperoleh keuntungan. Setara dengan pengertian ini adalah istilah menjalankan perusahaan, yang merupakan suatu kegiatan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

bahwa kegiatan tersebut harus dilakukan secara terus menerus dalam pengertian yang tidak terputus-putus;

bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara terang-terangan dalam pengertian sah/legal;

bahwa kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Berangkat dari tujuan yang ingin dicapai baik oleh kegiatan bisnis maupun menjalankan perusahaan, maka hukum bisnis dapat diartikan sebagai :

Setiap perangkat hukum (undang-undang atau peraturan lain) yang mengatur setiap kegiatan menjalankan perusahaan.

Jadi hukum bisnis adalah setiap perangkat peraturan yang mengatur hubungan hukum para pelaku ekonomi/atau para pihak yang menjalankan perusahaan.

Pada kenyataannya, kegiatan menjalankan perusahaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sangat kompleks dan tidak terputus-putus, dengan demikian hukum bisnis seharusnya mampu untuk selalu menyediakan berbagai perangkat peraturan yang dibutuhkan oleh kegiatan berusaha

di dalam masyarakat yang secara terus menerus selalu berkembang dan bertambah.

Dengan demikian hukum bisnis harus selalu mampu memberi solusi apabila terjadi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis pada umumnya.

Hadirin yang saya muliakan.

Kegiatan para pelaku ekonomi sebagai subyek hukum, selalu menunjukkan kecenderungan semakin mapan, dengan frekuensi yang makin cepat dan jenis hubungan hukum yang makin beragam. Oleh karena itu hukum bisnis pada dasarnya selalu menjadi makin berkembang sejalan dengan :

1. Adanya peluang bisnis/usaha baru
2. Adanya komoditi baru yang ditawarkan oleh Iptek/ Teknologi
3. Adanya kebutuhan-kebutuhan baru di dalam pasar
4. Adanya perubahan politik ekonomi
5. Adanya berbagai faktor pendorong lain misalnya pergeseran politik dan pangsa pasar

✓ Guna memenuhi dan mengantisipasi terhadap kemungkinan dan peluang yang ada, lembaga pembentuk hukum, kajian hukum termasuk pendidikan hukum seharusnya mampu memberikan solusinya sesuai dengan perkembangan dunia bisnis.

Jadi hukum bisnis pada hakekatnya selalu dapat dan mampu berkembang, sesuai dengan kebutuhan, melalui titik-titik simpul yang bersumber dari hukum perdata (yaitu dari hukum perikatan/perjanjian) dan dari titik-titik simpul yang berasal dari hukum dagang.

Yang dimaksud dengan titik-titik simpul adalah asas-asas hukum perdata/perikatan yang mengandung norma-norma hukum yang bersifat universal dan asas-asas hukum dagang yang berlaku secara internasional dan tidak bertentangan dengan kebiasaan internasional.

Meskipun demikian satu hal yang harus tetap menjadi tolok ukur utama adalah bahwa norma-norma hukum termasuk tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan dalam rangka mencapai kesejahteraan manusia. Dengan demikian tetaplah berlaku bahwa keseimbangan kepentingan tetap menjadi pedoman utama.

Mengingat hukum bisnis pada hakikatnya bersifat netral, maka perspektif hukum bisnis adalah sejalan dan sejajar dengan perspektif bisnis itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi tumpuan bagi perkembangan dunia bisnis, sangat membutuhkan berbagai perangkat hukum/perangkat peraturan baru yang mampu memenuhi kebutuhan.

Sampai saat ini dan untuk masa-masa selanjutnya yang masih sangat dibutuhkan antara lain perangkat hukum mengenai :

- transaksi jaminan, sebagai inovasi dari hukum hipotik dan gadai, antara lain tentang gadai kedua, jaminan atas hak milik intelektual dan berbagai kemungkinan lain.
- persaingan sehat, sebagai inovasi dari peraturan tentang persaingan curang.
- peraturan tentang lembaga keuangan baru atau lembaga pembiayaan baru.
- instrument surat berharga baru, untuk pasar uang dan modal

- instrument alat pembayaran baru, dan sebagainya

Dengan demikian sangat dapat dimengerti bahwa kajian hukum bisnis akan menjadi satu kajian yang cukup menarik, karena selalu berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan/kegiatan bisnis dan kegiatan ekonomi pada umumnya.

Dan akhirnya, betapapun tingginya ilmu pengetahuan dan majunya teknologi serta lengkapnya nilai-nilai yang mengaturnya dalam perangkat hukum yang ada, semuanya akan bertumpu baik pada titik awal dan titik akhir pada manusia-manusia yang bersangkutan. Dan semuanya akan berakhir pada nilai-nilai kemuliaan dan pemuliaan kehidupan kemanusiaan.

Hadirin yang saya muliakan.

Perkenalkanlah saya berdialog khusus dengan para mahasiswa sebagai pengemban masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta ini.

Saudara-saudara para mahasiswa yang saya cintai.

Harapan Bagi Mahasiswa

Masa depan adalah masa depan milikmu yang kamu tentukan hari ini. Oleh karena itu bersiaplah sejak hari ini. Pada era teknologi ini adalah era kompetisi, yang muncul adalah yang mampu memenangkan kompetisi, dialah yang siap dan menyiapkan diri. Jadi untuk dapat sebagai pemenang untuk itu membutuhkan berbagai bekal dan persiapan yang cukup.

Khusus kepada mahasiswa Fakultas Hukum, berbanggalah menjadi mahasiswa yang menekuni bidang hukum, karena bidang inilah pemuliaan kemanusiaan dapat diwujudkan.

kan, oleh karena itu asahlah pikiran dan nuranimu untuk menegakkan keadilan yang sebenarnya.

Perangkat peraturan yang dibutuhkan yang sebagian kecil saya kemukakan tersebut akan menjadi tugasmu di masa mendatang. Saya hanya titip pesan, tetaplah pada nilai-nilai hakiki kemanusiaan yang beradab sesuai dengan fitrah kita sebagai ciptaan-Nya.

Hadirin yang saya muliakan

*Ucapan
Terima Kasih*

Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan karena Anugerah-Nya semata-mata ini saya pribadi mohon dengan hormat sudilah menerima ucapan terima kasih saya yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya, karena dengan penuh kerelaan para hadirin bersedia hadir dan mendengarkan pidato pengukuhan ini hingga selesai.

Oleh karena itu dengan kesaksian para hadirin, pada kesempatan ini pulalah saya mengucapkan terima kasih kepada : Pemerintah Republik Indonesia (melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) yang telah mengangkat saya sebagai Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Kepada Prof. Dr. H. Muladi, SH, sebagai Rektor dan Ketua Senat Universitas Diponegoro, para Anggota Senat karena telah menyetujui dan menyatakan tidak keberatan atas pengusulan dan pengangkatan saya sebagai Guru Besar Madya, meneruskannya kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, yang pada akhirnya hari ini saya mendapat kesempatan menyampaikan pidato pengukuhan.

Kepada Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan para anggota Senat Fakultas Universitas Diponegoro yang telah memberikan persetujuan awal serta meneruskan pengusulan kenaikan tingkat saya sebagai Guru Besar Madya. Ucapan banyak terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada Prof. dr. Muljono S. Trastotenojo, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, dan Prof. Soehardi, yang telah dengan langsung atau tidak langsung memberikan dorongan dan bimbingan sehingga penghargaan tertinggi ini dapat saya capai.

Secara khusus saya ucapkan terima kasih pula yang tidak terhingga kepada Promotor saya, Ibu Prof. Emmy Pangaribuan Simandjuntak, SH yang telah membimbing saya sebagai anak didiknya yang pertama, juga kepada Ko-Promotor saya, Ibu Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH, almarhum Prof. KPH. Hapsoro Djajaningprang, SH, sehingga saya dapat mencapai jenjang keilmuan yang tertinggi. Tidak dapat saya lupakan almarhum Bapak Samiadji Soerjotjarko, SH yang telah mendorong sehingga saya tetap tabah. Kepada semua guru-guru saya di Sekolah Rakyat St. Clara Semarang, SMP Negeri 2 Semarang dan SMA C. Semarang, serta di Fakultas Hukum UNDIP, karena beliau-beliaulah saya dapat menjadi seperti hari ini.

Kepada seluruh rekanku di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, rekan sebaya dan rekan muda edukatif dan administrasi yang menjadi saudara-saudaraku dalam suka dan duka, sungguh saya sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan perhatian yang telah diberikan kepada saya selama ini.

Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua dan Pengurus Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang, Rektor beserta staf Universitas 17 Agustus 1945, beserta seluruh Civitas Akademika yang telah memberikan perhatian sejak tahun 1967 hingga sekarang. Dan secara khusus Dekan Fakultas Hukum dengan seluruh stafnya yang telah memberikan bantuan dan dukungan sedemikian besarnya saya ucapkan terima kasih.

Kepada Bapak Soemario pribadi yang selalu mengatakan dan mengingatkan saya jangan menunggu pekerjaan, tetapi ciptakan pekerjaan saya ucapkan terima kasih pula karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk mulai belajar bekerja sehingga saya dapat seperti sekarang ini.

Kepada seluruh rekan-rekan sepekerjaan pada Fakultas Hukum UNDIP, kita adalah bersaudara, karena kita berkarya pada tempat yang sama sejak awal sampai akhir nanti, oleh karena itu saya sangat-sangat berterima kasih atas penerimaan saudaraku terhadap diri saya selama ini, rekan Bagian Hukum Keperdataan, rekan dan Saudara kelompok Kajian Hukum Perdata Indonesia dan Hukum dan Wanita, iku-tilah jejakku hingga lembaga menjadi bangga terhadapmu.

Kepada Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan seluruh jajarannya, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan kerjasamanya sejak tahun 1978 hingga sekarang

Dan akhirnya kepada orang tuaku R. Soewarto almarhum ayahandaku yang telah mengolah pekeritaku menjadi seperti hari ini karena beliau berdualah yang selalu sejak saya usia sangat dini mendidik untuk mengingat keberadaan diri

sendiri, siapakah aku dan apakah aku yang sesungguhnya tiada arti di depan Sang Khaliq, Pencipta dan dengan sesama selalu lah menundukkan diri dengan sadar siapa kamu sebenarnya, serta harus mencintai sesama dengan tulus dan ikhlas.

Kepada Ibuku tercinta yang hari ini hadir menyaksikan puteri tunggalnya dapat berdiri di mimbar dan sungkem hormat saya hari ini saya persembahkan semuanya untuk beliau, karena beliaulah yang mewakili diriku apabila aku bertugas.

Kepada suami ku tercinta Hartono, anak-anakku Mita dan Dodi, kuakui dengan jujur, hari ini aku mampu berdiri pada mimbar ini bukanlah karena aku sendiri, tetapi karena pengorbanan dan dorongan pengertian kalian semata-mata.

Suami yang selalu menggandeng tangan ini untuk maju bersama dalam suka dan duka dalam rangka menatap masa depan anak-anak kita, saya ucapkan terima kasih pula dengan rasa hormat yang tidak terhingga.

Kepada almarhum mertuaku, Bapak R. Kasmadi Kartosuparto dan Ibu Sukarsih juga saya ucapkan terima kasih, termasuk Saudara-saudara suami ku semua.

Hal yang sama saya berikan kepada rekan dan saudaraku di Fakultas Hukum UNTAG khususnya (karena saya mempunyai kenangan khusus terhadap Fakultas Hukum UNTAG sejak tahun 1967) , Fakultas Hukum UNISSULA dan Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata, saya ucapkan terima kasih karena telah menjalin kerjasama selama ini dapat bekerja dengan baik saya berikan penghargaan dan terima kasih.

Kepada seluruh Panitia Penyelenggara Acara Pengukuhan ini, baik dari lingkungan Universitas Diponegoro maupun bukan, saya pribadi dan seluruh keluarga sangat berterima

kasih atas jerih payah, bantuan moril maupun material sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Semoga budi baik saudara-saudara sekalian diberi rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Pemberi dan Pengasih. Amin....!

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



DAFTAR REFERENSI

- Badruzaman, Prof. Dr. Mariam Darus , SH, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, (Kumpulan Karangan), Alumni : Bandung, 1981.
- Black, Henry Campbell, Black 's Law Dictionary , With Pronunciations cet. 5. Library of Congress Cataloging in Publication Data, West Publishing Company, USA, 1979.
- Bono, Edward De Serious Creativity, Using the Power of Lateral Thinking to Create New Ideas, Harper Business, New York 1992.
- Booth, Anne, William Jo' Malley, Anna Wiedemann, (ed), Sejarah Ekonomi Indonesia, (terjemahan Mien Joebhaar), LP3ES Jakarta, 1988.
- Drucker, Peter. F., The New Realities, In Government and Politik, In Economics and Business, in Society and World View, Harper dan Row. Publishers, New York, 1989.
- Drucker, Peter F, Pengantar Manajemen, (Terjemahan Ny. Rochmulyati Hamzah). PT. Pustaka Binaman Press-indo, Jakarta, 1982.
- Friedman W, Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum, (Terjemahan Muhamad Arifin), Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Naisbitt, John & Patricia Aburdene, Re-inventing The Corperation, Transforming your job and your company for the new information society, Warner Books, A Warner Communication Company, New York, 1985.
- Naisbitt, John & Patricia Aburdene, Megatrends 2000. Ten New Directions for the 1990's, William Morrow and Company, Inc New York, 1990.
- Naisbitt, John, Global Paradox, Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil, (Terjemahan Drs. Budijanto), Binarupa Aksara, Jakarta, 1994.
- Nasution Dr. Ir. , Muslimin, Kaitan Pengembangan Teknologi dan Sumberdaya Manusia dengan Pengelolaan Ekonomi Makro, Seminar Nasional mengenai Strategi

Pengembangan Teknologi dan Sumberdaya Manusia untuk Peningkatan Keunggulan Kompetitif dan Martabat Bangsa, UGM, Yogyakarta, 1993.

Panglaykim, Prof. Dr. J., Beberapa Aspek Ekonomi dan Bisnis Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Porter, Michael E., Keunggulan Bersaing, Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul (Terjemahan Tim Penerjemah Binarupa Aksara : Competitive Advantage), Binarupa Aksara, Jakarta, 1994.

Redjeki, Dr. Sri Hartono, SH, Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional (Ditinjau dari Aspek Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi), Majalah Hukum Nasional No. 2/95 (edisi khusus), BPHN, Jakarta, 1995.

Soehardi, Iptek, Pembangunan dan Perguruan Tinggi, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap UNIKA Soegijapranata, Semarang, 1993.

Sumodiningrat, Gunawan, Kaitan Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Manusia dengan Pengelolaan Ekonomi Makro, Seminar Nasional Strategi Pengembangan Teknologi dan Sumberdaya Manusia untuk Peningkatan Keunggulan Kompetitif dan Martabat Bangsa, UGM, Yogyakarta, 1993.

Toffler, Alvin, Kejutan Masa Depan (Future Shock), terjemahan Dra. Sri Koesdiyatinah, SB, PT. Panca Simpati, Jakarta 1970.

Toffler, Alvin, Power Shift, Knowledge. Wealth, and Violence at The Edge of to the Zizt Centurey, Bantam Books, New York, 1990.

Winardi, Dr. SE, Pengantar Ilmu Manajemen (Suatu Pendekatan Sistem), Nova, Bandung.

-----, Hukum Nasional Keempat Tahun 1979, Buku II, Seminar BPHN, Binacipta, Jakarta, 1983.

RIWAYAT HIDUP

01. Identitas diri

N a m a : Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.

Tempat & Tgl Lahir : Purwodadi, 5 Mei 1942

Status Perkawinan : Kawin dengan Prof. Drs. Hartono Kasmadi, MSc. tanggal 23 Maret 1968.

Jumlah Anak : 2 orang

1. Paramita Prananingtyas, SH
(30 Juni 1969)
Asisten Ahli Fak. Hukum
UNDIP,
kini sedang belajar Program
Pasca di Univesity of Florida,
Gainesville, Florida , USA.
2. Dorojatun Prihandono
(9 Nopember 1973), Maha-
siswa Fakultas Ekonomi
UNDIP, Semester VII, Pro-
gram Studi Manajemen.

Alamat : Jalan Badak III/33 Semarang

02. Pangkat / golongan : Lektor Kepala Madya / Golongan
IV B pada Fakultas Hukum Uni-
versitas Diponegoro

03. Jabatan : Ketua Program Notariat Fakultas
Hukum UNDIP

04. Pendidikan

Nama Pendidikan	Tempat	Tahun	Ijazah
1. Sekolah Dasar	Semarang	1955	Tamat/Ijazah
2. SMP Negeri II	Semarang	1958	Tamat/Ijazah
3. SMA - C Negeri	Semarang	1961	Tamat/Ijazah
4. UNDIP	Semarang	1966	Tamat/Ijazah
5. UNDIP	Semarang	1990	Doktor Ilmu Hukum

05. Pendidikan Tambahan :

Pendidikan tambahan dan kepelatihan/penataran yang telah diikuti antara lain :

1. Penataran Hukum Perdata, UGM, 1974
2. Penataran Sistem dan Pengukuran Pendidikan Universitas Diponegoro, 1968.
3. Akta Mengajar V, tahun 1982
4. Penataran Rekonstruksi Kuliah, 1989.

06. Riwayat Pekerjaan / Kepangkatan :

1. Calon Pegawai Negeri FH. UNDIP, -1 Pebruari 1973
2. Asisten Ahli Madia / Gol. IIIa -1 Pebruari 1974
3. Asisten Ahli / Gol. IIIb -1 April 1976
4. Lektor Muda / Gol. IIIc -1 April 1979
5. Lektor Madia / Gol IIId -1 April 1981
6. Lektor / Gol. IV a -1 Nopember 1984
7. Lektor Kepala Madia / Gol. IV b -1 April 1988
8. Guru Besar Madia / Gol IV b -1 Mei 1995

07. Kegiatan Mengajar di Luar Fakultas Hukum UNDIP sampai dengan sekarang :

- | | |
|---|------------|
| 1. Fak. Ekonomi UNDIP | sejak 1980 |
| 2. Fak. Ilmu Sosial dan Politik UNDIP | sejak 1980 |
| 3. Fak. Hukum UNTAG 1945 Semarang | sejak 1967 |
| 4. Fak. Hukum UNIKA Soegijapranata Semarang | sejak 1985 |
| 5. Fak. Ekonomi UNIKA Soegijapranata Semarang | sejak 1987 |
| 6. Fak. Hukum UNISSULA Semarang | sejak 1970 |
| 7. Fak. Pascasarjana Fakultas Hukum UNDIP | sejak 1994 |
| 8. Prog. Magister Management Fak. Ekonomi UNDIP | sejak 1995 |

08. Karya Tulis Ilmiah :

1. Buku :

- | | |
|--|-----------|
| a. Arbitrase | 1980 |
| b. Hukum Kepailitan | 1979 |
| c. Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan | 1980 |
| d. Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga | 1980 |
| e. Asuransi dan Hukum Asuransi | 1985 |
| f. Kapita Selektta Hukum Perusahaan | 1988 |
| g. Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit (Segera Terbit) | |
| h. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi | 1993/1995 |

2. Karya Penelitian :

- a. Pelaksanaan Kepres No. 14 A Tahun 1980
- b. Penerapan Pasal 22 KUH Dagang
- c. Potensi Asuransi Jiwa pada Pegawai Negeri di Kodia Semarang
- d. Pelaksanaan Asuransi Nelayan di Jawa Tengah
- e. Pemanfaatan Klausula Tambahan pada Asuransi Kebakaran di Indonesia
- f. Aspek Hukum Perjanjian Keagenan / Distribusi, BPHN
- g. Aspek Hukum Kegiatan Perusahaan Modal Ventura, BPHN

3. Makalah pada Ceramah, Seminar, Lokakarya, Simposium :

- a. Negosiasi dan Kontrak Dagang
- b. Peningkatan Sektor Usaha Kecil Suatu Tinjauan Yuridis
- c. Pembinaan Cita dan Asas-asas Hukum Nasional (Ditinjau dari Aspek Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi).
- d. Industrialisasi, Pola Manfaat dan Tantangan.
- e. Perusahaan di luar Perseroan Terbatas dan Koperasi di Indonesia
- f. Aspek Hukum Perusahaan Multi Nasional (MNC) di Indonesia
- g. Pengaturan Hak Milik Intelektual di Indonesia
- h. Tinjauan Hukum terhadap Kredit Macet
- i. Prospek Pasar Modal di Indonesia dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham

- j. Prospek Hukum Perjanjian Indonesia
- k. Beberapa Aspek tentang Permodalan pada Perseoran Terbatas
- l. Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual
- m. Arti Pentingnya Lembaga Lelang Prospek dan Pengaturannya
- n. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Perbankan
- o. Perusahaan Modal Ventura di Indonesia
- p. Usaha Perasuransian di Indonesia Menyongsong Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua
- q. Kebutuhan Hukum atas Lembaga Pembiayaan di Indonesia

09. Kegiatan Lain-lain :

Mengikuti pertemuan Ilmiah Nasional dan Internasional, sebagai peserta dan / atau pembicara :

- a. Simposium tentang Asuransi, BPHN 1978
- b. Simposium Perlindungan Konsumen, BPHN 1980
- c. Simposium tentang Perusahaan MNC, BPHN 1980
- d. Simposium tentang Pembaharuan Hukum Dagang , BPHN 1981
- e. Anggota Tim Pengkajian Hukum Dagang, BPHN, 1982-1983
- f. Anggota Pembahasan dan Penyusunan Rencana Kodifikasi Hukum Dagang, BPHN 1983-1984
- g. Seminar Hukum Dagang, BPHN 1983

- | | |
|--|-----------|
| h. Anggota Tim Antar Departemen dan Perguruan Tinggi Pembahasan dan Penyusunan RUU tentang Hukum Dagang | 1983-1984 |
| i. Lokakarya tentang Persero, BPHN | 1984 |
| j. Seminar Tanggungjawab Perusahaan | 1986 |
| k. Simposium Hukum Perjanjian Asuransi dalam Kenyataan dan Harapan, Jakarta | 1987 |
| l. Seminar Hukum Perseroan dan Hukum Pertanggungan (Asuransi), UGM | 1988 |
| m. Seminar Appraisal Membuka Cakrawala Baru dalam Profesi | 1988 |
| n. Seminar Asas-asas Hukum Nasional, BPHN | 1989 |
| o. Seminar Pengembangan Hukum Dagang , BPHN | 1989 |
| p. Diskusi "Persaingan antar Bank" | 1989 |
| q. The Second Seminar Singapore-Indonesia on Business Law | 1994 |
| r. Dialog Hukum Ekonomi Indonesia-Belanda | 1994 |
| s. Seminar Hukum Nasional II | 1994 |
| t. Seminar Akbar Limapuluh Tahun Pembinaan Hukum sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional, dalam PJP II | 1995 |
| u. Lokarkarya Transaksi Efek | 1995 |
| v. Seminar Menyongsong Berlakunya UU No. 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas | 1995 |

10. Partisipasi pada Organisasi Profesi dan Kegiatan Lainnya :

- a. Anggota PAHAI (Perhimpunan Ahli Hukum Asuransi Indonesia)

- b. Anggota Tim Pembentukan Pasar Modal Jawa Tengah
- c. Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Dagang Indonesia
- d. Ketua Kelompok Kajian Hukum dan Wanita Fak. Hukum UNDIP
- e. Ketua Tim Paten , Universitas Diponegoro
- f. Ketua Tim Penyusunan Konpendium Bidang Hukum Dagang
- g. Anggota Tim Penyusunan tentang Keagenan
- h. Anggota Tim Penyusunan Naskah Akademis tentang Bentuk Usaha Mutual.

